Community Engagement & Emergence Journal
Volume 7 Nomor 6, Tahun 2026
Halaman : 5240-5255

Pengaruh Fintech, Konsumsi Rumah Tangga, Penetrasi Internet, Dan Upah Minimum Regional Tehadap Inflasi Di Pula Jawa Tahun 2021-2025 (Jawa Barat, Banten, Dki Jakarta, Jawa Tngah, Jawa Timur, Dan Di Yogyakarta)

The Effect Of Fintech Application Use, Financial Literacy, Social Environment, And Self-Control On Impulse Buying Of Generation Z Students At Muhammadiyah University Of Surakarta

Ahnaf Fadhil Adya[a]*, Sitti Retno Faridatusalam[b]
Universitas Muhammadiyah Surakarta[a,b]
fadhiladyaa@gmail.com[a], srf122@ums.ac.id[b]

Abstract

Java Island contributes more than half of Indonesia's national Gross Regional Domestic Product (GRDP), making inflation dynamics in this region highly influential to the country's overall inflation. This study aims to analyze the effect of fintech, household consumption, internet penetration, and the Regional Minimum Wage (UMP) on inflation across six provinces in Java (DKI Jakarta, West Java, Central Java, DI Yogyakarta, East Java, and Banten) during the 2021–2025 period. A quantitative causal-associative approach was employed using panel data, analyzed with a Random Effect Model (REM) selected through the Chow and Hausman tests. The results show that fintech has a negative and significant effect on inflation (coefficient -0.643247; probability 0.0000), likely driven by transaction efficiency and price transparency from payment digitalization. Household consumption has a positive and significant effect (coefficient 0.210755; probability 0.0015), consistent with demand-pull inflation theory. Internet penetration has a positive but marginally significant effect (coefficient 0.017019; probability 0.0499). The Regional Minimum Wage has a positive and significant effect (coefficient 0.366394; probability 0.0086), in line with the cost-push inflation mechanism. Simultaneously, all four variables significantly affect inflation (F-statistic probability 0.000000), with an R-squared of 0.956351, indicating the model explains 95.6 percent of inflation variation across Java. These findings confirm that regional inflation dynamics are shaped by the interaction of conventional demand factors, labor policy, and digital economic transformation operating through distinct, and sometimes opposing, channels.
Keywords: fintech, household consumption, internet penetration, regional minimum wage, inflation, panel data, Java Island

Abstrak

Pulau Jawa menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional, sehingga dinamika inflasi di wilayah ini memiliki pengaruh besar terhadap inflasi Indonesia secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fintech, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap inflasi di enam provinsi Pulau Jawa (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten) selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal dengan data panel yang dianalisis menggunakan Random Effect Model (REM), setelah melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi (koefisien -0,643247; probabilitas 0,0000), yang diduga terjadi melalui efisiensi transaksi dan transparansi harga akibat digitalisasi pembayaran. Konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,210755; probabilitas 0,0015), konsisten dengan teori demand-pull inflation. Penetrasi internet berpengaruh positif dengan signifikansi marginal (koefisien 0,017019; probabilitas 0,0499). Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan (koefisien 0,366394; probabilitas 0,0086), sejalan dengan mekanisme cost-push inflation. Secara simultan, keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap inflasi (probabilitas F-statistic 0,000000) dengan nilai R-squared sebesar 0,956351, yang berarti model mampu menjelaskan 95,6 persen variasi inflasi di Pulau Jawa. Hasil ini menegaskan bahwa dinamika inflasi regional dibentuk oleh interaksi antara faktor permintaan konvensional, kebijakan ketenagakerjaan, dan transformasi ekonomi digital yang bekerja melalui kanal yang berbeda-beda.

https://journal.yrpipku.com/index.php/ceej
e-ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

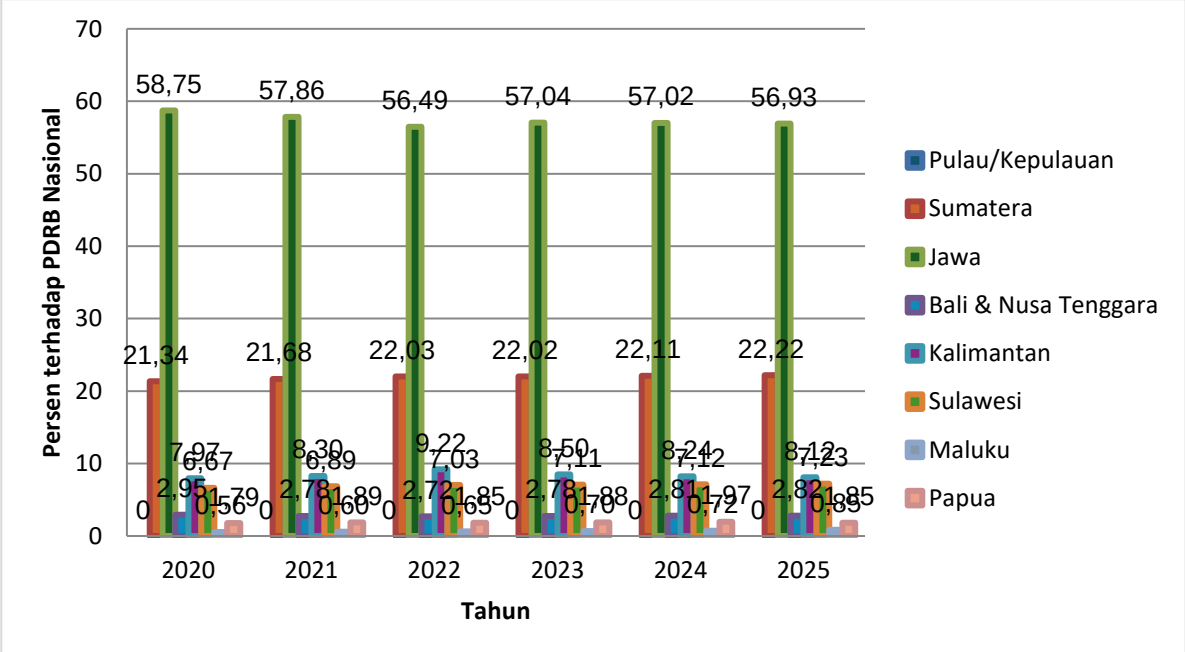
Kata Kunci: fintech, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, upah minimum provinsi, inflasi, data panel, Pulau Jawa

1. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, dunia kerja mengalami perubahan yang sangat signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19 yang mempercepat transformasi digital serta mengubah cara karyawan memandang pekerjaan. Kondisi tersebut mendorong terciptanya lingkungan kerja yang semakin kompetitif dan dinamis, sehingga organisasi dituntut untuk mampu menjaga serta meningkatkan kinerja karyawan agar tetap memiliki daya saing yang berkelanjutan. Kinerja karyawan menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi karena berkaitan langsung dengan produktivitas, efektivitas operasional, dan pencapaian tujuan perusahaan.

Pulau Jawa memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional dibandingkan wilayah lainnya. Menurut Mubaroh & Yulianto (2025), mencatat bahwa Pulau Jawa menyumbang sekitar 58,67% terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indonesia, sehingga menjadi wilayah dengan aktivitas industri dan ekonomi yang paling besar di Indonesia. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang didukung oleh tingginya kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan konsumsi masyarakat. Kondisi ini membuat perkembangan ekonomi Pulau Jawa memiliki peran penting dalam memengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Tabel 1 Tren Distribusi PDRB per Pulau di Indonesia tahun 2020-2025



Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2026)

Fenomena dominasi Pulau Jawa dapat dilihat pada Tabel 1 yang menyajikan distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut pulau/kepulauan di Indonesia periode 2020–2025. Berdasarkan data BPS, Pulau Jawa secara konsisten menyumbang lebih dari separuh total PDRB nasional, yaitu sebesar 58,75% pada tahun 2020 dan 56,93% pada tahun 2025. Meskipun pangsanya sedikit menurun, kontribusi Pulau Jawa masih jauh lebih besar dibandingkan pulau lainnya. Pulau

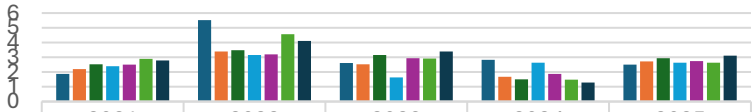
Sumatera sebagai penyumbang terbesar kedua hanya berkontribusi sekitar 21–22%, sedangkan pulau lainnya secara kumulatif menyumbang kurang dari seperlima PDRB nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Temuan tersebut sejalan dengan Mubaroh & Yulianto (2025), yang mencatat kontribusi Pulau Jawa sebesar 58,67% terhadap PDRB nasional. Konsentrasi ekonomi ini penting dikaji karena dapat memengaruhi perbedaan transmisi kebijakan moneter dan dinamika inflasi antarwilayah. Aginta dan Someya (2022) menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di Jawa-Bali cenderung merespons guncangan kebijakan moneter lebih selaras dengan tingkat nasional dibandingkan wilayah lainnya.

Selain memiliki kontribusi ekonomi yang besar, Pulau Jawa juga memiliki karakteristik perekonomian yang berbeda dibandingkan wilayah lain. Aginta & Someya (2022) menunjukkan bahwa pergerakan inflasi di wilayah Jawa-Bali cenderung sejalan dengan inflasi nasional, yang berkaitan dengan tingginya aktivitas industri manufaktur dan ketergantungan terhadap sektor perbankan. Oleh karena itu, dinamika inflasi di Pulau Jawa penting diperhatikan karena perubahan harga di wilayah ini berpotensi memberikan pengaruh besar terhadap inflasi nasional.

Inflasi merupakan salah satu indikator makroekonomi yang penting bagi stabilitas perekonomian. Selama periode 2020–2025, inflasi di Indonesia dan Pulau Jawa mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada masa pandemi COVID-19, tekanan inflasi cenderung rendah akibat melemahnya permintaan dan daya beli masyarakat. Susanti (2023) menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 turut memengaruhi fluktuasi harga pangan di provinsi-provinsi Pulau Jawa, khususnya harga beras. Pada tahun 2022, inflasi nasional meningkat hingga 5,51% akibat pemulihan permintaan serta tekanan harga pangan dan energi, sebelum kembali menurun pada 2023 dan 2024.

Selain itu, perkembangan inflasi antarprovinsi di Pulau Jawa juga menunjukkan perbedaan. Tri Wahyudi et al. (2021) menunjukkan bahwa variabilitas harga sejumlah komoditas pangan strategis antarprovinsi di Pulau Jawa cukup tinggi, terutama pada komoditas hortikultura. Kondisi ini menunjukkan bahwa setiap provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, menghadapi karakteristik dan tekanan inflasi yang berbeda.

Tabel 2 Perbandingan Inflasi Indonesia dengan Pulau Jawa



	2021	2022	2023	2024	2025
INDONESIA	1,87	5,51	2,61	2,82	2,5
Jawa Tengah	2,19	3,40	2,53	1,67	2,72
Jawa Timur	2,53	3,48	3,15	1,51	2,93
Jawa Barat	2,40	3,16	1,64	2,63	2,63
Banten	2,51	3,19	2,93	1,88	2,74
DKI Jakarta	2,89	4,56	2,91	1,48	2,63
DI Yogyakarta	2,78	4,10	3,39	1,28	3,11

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2026)

Tabel 2 menunjukkan perbandingan laju inflasi nasional dengan inflasi di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2021–2025. Inflasi nasional dan seluruh provinsi

di Pulau Jawa mencapai peningkatan tertinggi pada tahun 2022, ketika inflasi nasional mencapai 5,51%, sedangkan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing mencapai 4,56% dan 4,10%. Peningkatan tersebut berkaitan dengan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada September 2022 yang mendorong kenaikan harga, terutama pada kelompok transportasi dan bahan makanan. Pada tahun 2024, kondisi tersebut berbalik ketika inflasi di seluruh provinsi Pulau Jawa berada pada kisaran 1,28–1,88%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 2,82%. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tekanan inflasi tidak selalu sama antarwilayah dan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, struktur pasokan, serta kebijakan pengendalian inflasi di masing-masing daerah.

Secara umum, inflasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa cenderung mengikuti pola inflasi nasional, meskipun tingkat perubahannya berbeda antarprovinsi dan antartahun. Aginta & Someya (2022) menunjukkan bahwa inflasi di wilayah Jawa-Bali relatif sejalan dengan inflasi nasional karena karakteristik ekonominya yang lebih terintegrasi dengan sektor keuangan dan industri manufaktur. Dengan demikian, besarnya kontribusi ekonomi Pulau Jawa tidak menghilangkan adanya perbedaan dinamika inflasi antarprovinsi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi inflasi di Pulau Jawa, terutama di tengah perubahan struktur ekonomi dan perkembangan teknologi digital.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi digital, transformasi keuangan berbasis teknologi (*financial technology* atau *fintech*) di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat yang ditandai oleh meningkatnya penyaluran *fintech lending*, transaksi QRIS, dan penggunaan berbagai instrumen pembayaran digital. Anggraini & Agustin (2022) menunjukkan bahwa perkembangan instrumen pembayaran nontunai berkaitan dengan kecepatan perputaran uang (*velocity of money*) di Indonesia, meskipun keterkaitannya berbeda antarjenis instrumen pembayaran. Sementara itu, Azilla & Novianda (2024) menemukan adanya hubungan antara transaksi uang elektronik dan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang hubungan tersebut tidak menunjukkan keberlanjutan yang sama. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pembayaran digital dapat menjadi bagian dari perubahan aktivitas transaksi dan pola konsumsi masyarakat seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi keuangan.

Keterkaitan antara perkembangan pembayaran digital dan dinamika inflasi dapat dijelaskan melalui konsep *velocity of money*. Anggraini dan Agustin (2022) menunjukkan bahwa *velocity of money* dapat menjadi mekanisme yang menghubungkan perkembangan instrumen pembayaran nontunai dengan inflasi. Peningkatan aktivitas pembayaran digital berpotensi mempercepat perputaran uang dan meningkatkan aktivitas transaksi dalam perekonomian, yang secara teoritis dapat berkaitan dengan tekanan harga dari sisi permintaan. Mekanisme tersebut sejalan dengan teori kuantitas uang yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar, kecepatan perputaran uang, tingkat harga, dan output. Oleh karena itu, perkembangan fintech dan pembayaran digital menjadi fenomena yang relevan untuk dikaji dalam memahami dinamika inflasi, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki aktivitas ekonomi dan perkembangan digital yang relatif tinggi.

Di sisi lain, semakin luasnya penetrasi internet turut mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat melalui kemudahan transaksi pada platform *e-commerce*, sekaligus meningkatkan akses terhadap informasi dan perbandingan harga antarwilayah. Perkembangan tersebut berkaitan dengan perubahan pola permintaan,

aktivitas transaksi, dan mekanisme pembentukan harga dalam perekonomian. Chandra & Nasution (2026), berdasarkan data Indonesia periode 2019–2024, menunjukkan adanya keterkaitan antara penetrasi internet, transaksi digital, dan inflasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa perluasan akses internet dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi informasi harga, sementara perkembangan transaksi digital berkaitan dengan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan digitalisasi ekonomi memiliki keterkaitan yang kompleks dengan dinamika harga dan inflasi.

Pada tingkat internasional, Darwiche & Baker (2026), melalui penelitian pada 15 negara berkembang yang menerapkan kerangka *inflation targeting*, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa penetrasi internet berkaitan dengan mekanisme *exchange rate pass-through* (ERPT) terhadap inflasi. Perluasan akses internet dapat mempercepat penyebaran informasi dan penyesuaian harga domestik terhadap perubahan nilai tukar maupun harga global. Berbagai temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan fintech, pembayaran digital, dan penetrasi internet merupakan bagian dari perubahan struktur aktivitas ekonomi yang perlu diperhatikan dalam memahami dinamika inflasi. Namun, keterkaitan antara perkembangan digitalisasi ekonomi dan inflasi, khususnya di Pulau Jawa, masih memerlukan kajian lebih lanjut karena inflasi tidak hanya mencerminkan perubahan tingkat harga pada suatu periode, tetapi juga memiliki karakteristik persistensi.

Di sisi lain, kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang mengalami penyesuaian secara berkala juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam dinamika inflasi. Kenaikan upah secara teoritis dapat meningkatkan biaya produksi dan berpotensi diteruskan ke harga barang dan jasa melalui mekanisme *cost-push inflation*. Namun, temuan empiris mengenai keterkaitan UMP dengan inflasi di Indonesia masih menunjukkan hasil yang beragam. Siagian & Hayati (2020), melalui analisis data panel 33 provinsi periode 2014–2018, menunjukkan adanya hubungan antara perubahan UMP dan tingkat inflasi yang tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme *cost-push inflation*. Temuan serupa ditunjukkan oleh Siringo-ringo et al. (2025) dalam studi di Sulawesi Utara periode 2000–2023, yang menunjukkan bahwa hubungan UMP dengan inflasi dapat berbeda antara jangka pendek dan jangka panjang. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa transmisi perubahan upah terhadap harga dapat dipengaruhi oleh karakteristik pasar tenaga kerja, produktivitas, serta struktur perekonomian masing-masing daerah.

Selain faktor dari sisi biaya, konsumsi rumah tangga merupakan komponen penting dalam aktivitas perekonomian dan berkaitan dengan tekanan inflasi dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*). Tingginya konsumsi rumah tangga dapat mencerminkan peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, terutama ketika pertumbuhan permintaan tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas produksi yang memadai. Siringo-Ringo et al. (2025) menunjukkan bahwa hubungan antara konsumsi rumah tangga dan inflasi juga dapat berbeda berdasarkan periode waktu, sehingga dinamika konsumsi tidak selalu menghasilkan respons inflasi yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMP dan konsumsi rumah tangga merupakan faktor yang relevan untuk diperhatikan dalam memahami dinamika inflasi, khususnya di Pulau Jawa yang memiliki aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat yang relatif tinggi.

Meskipun berbagai penelitian terdahulu telah membahas keterkaitan fintech, penetrasi internet, upah minimum, dan konsumsi rumah tangga dengan dinamika

inflasi, hasil yang diperoleh masih menunjukkan adanya perbedaan hubungan antarvariabel, periode, dan wilayah penelitian. Sebagian penelitian juga masih menggunakan cakupan wilayah nasional atau provinsi tertentu, sehingga kajian yang secara khusus menguji keempat faktor tersebut secara bersama-sama pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih terbatas. Padahal, Pulau Jawa memiliki karakteristik ekonomi, struktur produksi, tingkat digitalisasi, kondisi pasar tenaga kerja, dan pola konsumsi yang berbeda antarprovinsi.

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis pengaruh fintech, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, dan upah minimum regional terhadap inflasi pada enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2021–2025. Penelitian menggunakan pendekatan data panel untuk menangkap variasi antarwilayah dan antarwaktu secara komprehensif. Secara khusus, penelitian ini menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun pengaruhnya secara simultan terhadap inflasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika inflasi regional di tengah perkembangan digitalisasi ekonomi dan perubahan kondisi makroekonomi.

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi inflasi, baik dari sisi kebijakan pengupahan, konsumsi rumah tangga, maupun perkembangan ekonomi digital. Namun, hasil penelitian yang diperoleh masih menunjukkan perbedaan antarvariabel, periode, wilayah, dan metode analisis yang digunakan.

Terkait Upah Minimum Provinsi (UMP), Siringo-ringo et al. (2025) dalam penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Belanja Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Inflasi di Sulawesi Utara Tahun 2000–2023" menggunakan metode Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMP tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang. Berbeda dengan temuan tersebut, Siagian & Hayati (2020), melalui penelitian "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Output Gap dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi di 33 Provinsi di Indonesia Pada Tahun 2014–2018", menemukan bahwa UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara UMP dan inflasi belum konsisten serta dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah, periode pengamatan, dan kondisi perekonomian.

Penelitian mengenai konsumsi rumah tangga juga menunjukkan hasil yang beragam. Siringo-ringo et al. (2025) menemukan bahwa konsumsi rumah tangga tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek, tetapi berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang di Sulawesi Utara. Sebaliknya, Fitrianti & Rachmawati (2024), dalam penelitian "The Influence of Money Supply, Interest Rates, Household Consumption on Inflation in Indonesia", menemukan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Sementara itu, Dakhi et al. (2024), melalui penelitian "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah (Pendekatan Uji Kausalitas Granger)", tidak menemukan hubungan kausalitas antara konsumsi rumah tangga dan inflasi. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh

konsumsi rumah tangga terhadap inflasi dapat berbeda pada tingkat nasional dan provinsi serta bergantung pada karakteristik ekonomi dan periode penelitian.

Selain faktor konvensional, perkembangan ekonomi digital semakin mendapat perhatian dalam kajian inflasi. Chandra & Nasution (2026), dalam penelitian "Transformasi Ekonomi Digital dan Implikasinya terhadap Kebijakan Ekonomi Moneter di Indonesia", menemukan bahwa penetrasi internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Peningkatan akses internet dinilai dapat meningkatkan efisiensi pasar dan transparansi informasi harga sehingga berpotensi membantu menekan inflasi.

Temuan mengenai perkembangan sistem pembayaran digital juga ditunjukkan oleh Anggraini & Agustin (2022) dalam penelitian "Effect Cashless Payment on Inflation with Velocity of Money as Intervening Variable". Penelitian tersebut menemukan bahwa pengaruh pembayaran nontunai terhadap inflasi berbeda berdasarkan jenis instrumen dan sebagian ditransmisikan melalui kecepatan perputaran uang. Sejalan dengan temuan tersebut, Hermawan et al. (2024), melalui penelitian "Money Velocity, Digital Currency and Inflation Dynamics in Indonesia", menunjukkan bahwa kecepatan perputaran uang berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Hasil tersebut menegaskan bahwa perubahan kecepatan perputaran uang yang berkaitan dengan transformasi keuangan digital dapat menjadi salah satu saluran penting dalam dinamika inflasi di Indonesia.

Hasil penelitian lain terkait instrumen digital ditunjukkan oleh Rachmadona & Astuti (2025) melalui penelitian "Money Supply, Interest Rates, and Electronic Money as Determinants of Inflation in Indonesia: Evidence from VECM Analysis (2018–2023)". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi dalam jangka panjang, meskipun pengaruhnya tidak signifikan dalam jangka pendek. Sementara itu, Anam et al. (2024), melalui penelitian "Does Financial Technology Reduce Inflation? Lessons Learnt from Sumatra", menemukan bahwa fintech berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek pengaruhnya tidak signifikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan fintech dapat meningkatkan efisiensi transaksi dan menekan biaya transaksi sehingga berpotensi mengurangi tekanan inflasi.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa determinan inflasi di Indonesia masih memberikan hasil yang belum seragam. Pada variabel UMP, Siringo-ringo et al. (2025) menemukan pengaruh negatif dalam jangka panjang, sedangkan Siagian & Hayati (2020) menemukan pengaruh positif. Pada konsumsi rumah tangga, hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif, negatif, maupun tidak adanya hubungan kausalitas. Sementara itu, penelitian mengenai digitalisasi menunjukkan bahwa penetrasi internet, uang elektronik, dan fintech berpotensi menekan inflasi, sedangkan kecepatan perputaran uang dapat meningkatkan tekanan inflasi.

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya research gap mengenai hubungan antara kebijakan pengupahan, konsumsi rumah tangga, dan perkembangan digital dengan inflasi. Selain perbedaan hasil empiris, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada tingkat nasional atau wilayah di luar Pulau Jawa. Penelitian yang secara khusus menguji pengaruh fintech, UMP, konsumsi rumah tangga, dan penetrasi internet secara simultan terhadap inflasi pada enam provinsi di Pulau Jawa masih terbatas. Padahal, setiap provinsi di Pulau Jawa memiliki

karakteristik ekonomi, tingkat digitalisasi, struktur pasar tenaga kerja, dan pola konsumsi yang berbeda.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis pengaruh fintech, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, dan upah minimum regional terhadap inflasi pada enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2021–2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi inflasi regional serta memperluas kajian mengenai peran transformasi digital dan faktor ekonomi konvensional dalam dinamika inflasi di Indonesia.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan aplikasi fintech, literasi keuangan, lingkungan sosial, dan pengendalian diri terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis serta hubungan antar variabel yang diukur secara numerik (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh *fintech*, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, dan upah minimum provinsi terhadap inflasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pengujian hipotesis dan hubungan antarvariabel yang diukur secara numerik menggunakan data sekunder (Sugiyono, 2017). Data penelitian memiliki dua dimensi, yaitu dimensi lintas provinsi (*cross-section*) dan dimensi waktu (*time series*), sehingga analisis dilakukan menggunakan regresi data panel untuk menangkap variasi antarwilayah dan antarwaktu secara lebih komprehensif dibandingkan pendekatan *time series* atau *cross-section* tunggal.

Populasi penelitian mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki data Indeks Harga Konsumen (IHK) resmi dari Badan Pusat Statistik. Sampel ditentukan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Syahputri et al., 2023). Kriteria sampel meliputi provinsi yang berada di wilayah Pulau Jawa dan memiliki ketersediaan data yang lengkap serta konsisten selama periode penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel penelitian terdiri atas enam provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, selama periode 2021–2025. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan struktur data panel atau *pooled cross-section time series*.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk data panel yang menggabungkan data *time series* periode 2021–2025 dan data *cross-section* enam provinsi di Pulau Jawa. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan memanfaatkan publikasi resmi lembaga pemerintah dan otoritas terkait. Data inflasi, konsumsi rumah tangga, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), data *fintech* diperoleh dari Bank Indonesia (BI), sedangkan data penetrasi internet diperoleh dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Variabel penelitian terdiri atas satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen adalah inflasi (INF), yang diukur berdasarkan laju inflasi *year-on-year* berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada masing-masing

provinsi dan dinyatakan dalam persentase. Variabel independen terdiri atas *fintech* (FIN), yang diproksikan menggunakan nilai atau volume transaksi *fintech lending* dan/atau pembayaran digital seperti QRIS per provinsi; konsumsi rumah tangga (KON), yang diukur berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga dalam PDRB menurut pengeluaran per provinsi; penetrasi internet (INT), yang diukur berdasarkan persentase pengguna internet terhadap jumlah penduduk pada masing-masing provinsi; serta Upah Minimum Provinsi (UMP), yang diukur berdasarkan nilai nominal UMP yang berlaku setiap tahun. Variabel *fintech*, konsumsi rumah tangga, dan UMP ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural untuk menyesuaikan perbedaan skala data dan memperoleh estimasi yang lebih proporsional.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews. Metode data panel dipilih karena mampu mengombinasikan informasi *cross-section* dan *time series*, sehingga dapat menghasilkan estimasi yang lebih efisien, mengurangi masalah multikolinearitas antarvariabel, serta menangkap heterogenitas antarprovinsi yang tidak dapat diamati secara langsung (*unobserved heterogeneity*). Model regresi data panel yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{INF_{it} = \beta_0 + \beta_1 LogFIN_{it} + \beta_2 LogKON_{it} + \beta_3 INT_{it} + \beta_4 LogUMP_{it} + \varepsilon_{it}}$$

Keterangan:

IN	: Finflasi
FIN	: *fintech*
KON	: konsumsi rumah tangga
INT	: penetrasi internet
UMP	: Upah Minimum Provinsi
i	*: cross-section* atau provinsi
t	: periode waktu
β_0	: konstanta
β_1 hingga β_4	: koefisien regresi;
Log	: transformasi logaritma; dan
E	: *error term*.

Estimasi regresi data panel dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara CEM dan FEM. Apabila nilai probabilitas *Chi-Square* lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05), maka FEM dipilih. Selanjutnya, Uji Hausman digunakan untuk memilih antara FEM dan REM. Apabila nilai probabilitas *Chi-Square* lebih kecil dari 0,05, maka model FEM digunakan sebagai model estimasi.

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji *t*, uji *F*, dan koefisien determinasi (R^2). Uji *t* digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap inflasi secara parsial, dengan kriteria signifikansi sebesar 5% (0,05). Uji *F* digunakan untuk mengetahui pengaruh *fintech*, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, dan UMP secara simultan terhadap inflasi. Sementara itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi inflasi pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan kemampuan model yang semakin besar dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Hasil pengujian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	Prob.	Kesimpulan
Cross-section Chi-square	-	0.0395	Signifikan

Sumber: Hasil olah data panel (2026).

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 4.1, diperoleh nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0395, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak, sehingga terdapat perbedaan karakteristik antar cross-section yang signifikan dalam model penelitian. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM). Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM).

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang lebih tepat antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Hasil pengujian disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Prob.	Kesimpulan
Cross-section random	0.0714	H0 tidak ditolak

Sumber: Hasil olah data panel (2026).

Hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,0714 (> 0,05), sehingga hipotesis nol (H0) tidak ditolak. Dengan demikian, model yang dipilih sebagai model estimasi terbaik dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

Hasil Estimasi Random Effect Model

Berdasarkan hasil uji pemilihan model, estimasi regresi data panel dalam penelitian ini menggunakan Random Effect Model (REM). Hasil estimasi disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Random Effect Model

Variabel	Koefisien	Prob.	Keterangan (α = 5%)
C	3.295667	0.0359	-
LOG(FINTECH)	-0.643247	0.0000	Signifikan, arah negatif
LOG(KONSUMSI)	0.210755	0.0015	Signifikan, arah positif

PENETRASI	0.017019	0.0499	Signifikan marginal, arah positif
LOG(UMP)	0.366394	0.0086	Signifikan, arah positif

Sumber: Hasil olah data panel (2026).

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.3, model regresi data panel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$INFit = 3{,}295667 - 0{,}643247\ LOG(FIN)it + 0{,}210755\ LOG(KON)it + 0{,}017019\ INTit + 0{,}366394\ LOG(UMP)it + \varepsilon it$$

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji t (Parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas masing-masing variabel dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen, yaitu fintech, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, dan Upah Minimum Provinsi (UMP), secara parsial berpengaruh signifikan terhadap inflasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa selama periode 2021–2025. Variabel fintech memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi dengan koefisien sebesar -0,643247 dan nilai probabilitas 0,0000 < 0,05. Sementara itu, konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi dengan koefisien sebesar 0,210755 dan nilai probabilitas 0,0015 < 0,05. Penetrasi internet juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi dengan koefisien sebesar 0,017019 dan nilai probabilitas 0,0499 < 0,05, meskipun nilai signifikansinya sangat mendekati batas 5%. Selanjutnya, Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi dengan koefisien sebesar 0,366394 dan nilai probabilitas 0,0086 < 0,05. Dengan demikian, seluruh hipotesis parsial dalam penelitian ini dinyatakan diterima.

Uji F (Simultan)

Hasil uji F menunjukkan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000000 (< 0,05), yang berarti hipotesis nol (H0) ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel fintech, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, dan UMP secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap inflasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa periode 2021-2025.

Koefisien Determinasi

Nilai R-squared dalam penelitian ini sebesar 0,956351, yang menunjukkan bahwa variabel fintech, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, dan UMP secara bersama-sama mampu menjelaskan sekitar 95,6 persen variasi inflasi di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2021-2025, sedangkan sisanya sebesar 4,4 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti nilai tukar, harga komoditas global, dan kebijakan moneter Bank Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaruh Fintech terhadap Inflasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas transaksi fintech cenderung diikuti oleh penurunan tingkat

inflasi. Secara kuantitatif, setiap kenaikan 1 persen nilai atau volume transaksi fintech diasosiasikan dengan penurunan inflasi sekitar 0,0064 poin persentase. Hasil tersebut menunjukkan bahwa fintech tidak hanya berperan dalam mempermudah transaksi, tetapi juga berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi. Penggunaan layanan fintech dapat mempercepat pembayaran, menurunkan biaya transaksi, dan mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Selain itu, layanan keuangan digital dapat meningkatkan akses terhadap informasi dan alternatif transaksi, sehingga mendorong terciptanya pasar yang lebih efisien dan kompetitif. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menekan biaya ekonomi yang berpotensi mendorong kenaikan harga.

Temuan ini menunjukkan arah yang berbeda dengan mekanisme sederhana teori kuantitas uang, yang mengasumsikan bahwa peningkatan aktivitas transaksi dapat mempercepat velocity of money dan meningkatkan permintaan agregat sehingga berpotensi mendorong inflasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh fintech terhadap inflasi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan kecepatan peredaran uang, tetapi juga oleh efisiensi yang dihasilkan dari digitalisasi transaksi. Temuan ini sejalan dengan penjelasan Chandra dan Nasution (2026) mengenai peran penetrasi internet dalam menekan inflasi melalui penurunan biaya transaksi, peningkatan efisiensi distribusi, dan transparansi informasi harga. Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian Pratiwi dan Nurmalia (2024) serta Zulfa dan Syahnur (2025) yang menunjukkan bahwa hubungan antara instrumen pembayaran digital, velocity of money, dan inflasi tidak selalu mengikuti asumsi teori kuantitas uang secara sederhana. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan fintech di provinsi-provinsi Pulau Jawa dapat berkontribusi terhadap pengendalian inflasi melalui peningkatan efisiensi transaksi dan transparansi aktivitas ekonomi.

Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga terhadap Inflasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga cenderung diikuti oleh kenaikan tingkat inflasi. Secara kuantitatif, setiap kenaikan 1 persen konsumsi rumah tangga diasosiasikan dengan peningkatan inflasi sekitar 0,0021 poin persentase. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki peran penting dalam mendorong perubahan tingkat harga karena merupakan salah satu komponen utama aktivitas perekonomian daerah. Ketika daya beli dan pengeluaran masyarakat meningkat, permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Apabila peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan kapasitas produksi dan kelancaran distribusi, kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan terhadap kenaikan harga.

Temuan ini konsisten dengan teori demand-pull inflation, yang menjelaskan bahwa inflasi dapat terjadi ketika peningkatan permintaan agregat melebihi kemampuan perekonomian dalam menyediakan barang dan jasa. Dalam penelitian ini, peningkatan konsumsi rumah tangga menjadi salah satu sumber peningkatan permintaan agregat yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Hasil tersebut juga sejalan dengan kerangka teori konsumsi Fisher yang telah diuraikan pada Bab II, di mana keputusan konsumsi masyarakat berkaitan dengan kemampuan dan perilaku pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pada berbagai periode. Besarnya kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap struktur perekonomian Pulau Jawa turut memperkuat hubungan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga perlu diimbangi dengan peningkatan

kapasitas produksi dan kelancaran distribusi agar pertumbuhan permintaan tidak menimbulkan tekanan inflasi yang berlebihan.

Pengaruh Penetrasi Internet terhadap Inflasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetrasi internet berpengaruh positif terhadap inflasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa dengan tingkat signifikansi yang berada pada batas marginal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0499, yang sedikit lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian, secara statistik penetrasi internet berpengaruh signifikan terhadap inflasi, meskipun hasil tersebut perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena nilainya sangat dekat dengan batas signifikansi. Secara kuantitatif, setiap kenaikan 1 poin persentase penetrasi internet diasosiasikan dengan kenaikan inflasi sebesar 0,017019 poin persentase, dengan asumsi variabel lain konstan. Arah positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses internet di Pulau Jawa selama periode penelitian cenderung berkaitan dengan meningkatnya aktivitas dan permintaan ekonomi masyarakat. Kemudahan memperoleh informasi, melakukan transaksi, dan mengakses perdagangan digital dapat meningkatkan intensitas konsumsi serta memperluas aktivitas ekonomi berbasis digital.

Temuan tersebut berbeda dengan penelitian Chandra dan Nasution (2026) yang menemukan bahwa penetrasi internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi pada tingkat nasional Indonesia periode 2019–2024. Perbedaan arah pengaruh ini menunjukkan adanya kemungkinan heterogenitas transmisi penetrasi internet terhadap inflasi antara tingkat nasional dan regional, khususnya di Pulau Jawa. Pada tingkat regional, peningkatan penetrasi internet tidak hanya dapat menciptakan efisiensi dan transparansi informasi harga, tetapi juga dapat memperkuat sisi permintaan melalui kemudahan akses terhadap e-commerce, layanan digital, dan transaksi daring. Peningkatan permintaan tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga apabila tidak diimbangi dengan kapasitas produksi dan kelancaran distribusi. Dengan demikian, pengaruh penetrasi internet terhadap inflasi tidak hanya ditentukan oleh efisiensi pasar, tetapi juga oleh struktur pasar, perkembangan ekosistem digital, dan pola konsumsi masyarakat di masing-masing wilayah. Mengingat nilai probabilitas sebesar 0,0499 sangat dekat dengan ambang signifikansi 5%, hasil ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati dan dapat dikonfirmasi melalui penelitian lanjutan dengan periode pengamatan yang lebih panjang atau analisis sensitivitas untuk menguji kestabilan hubungan tersebut.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Inflasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan UMP cenderung diikuti oleh kenaikan tingkat inflasi. Secara kuantitatif, setiap kenaikan 1 persen UMP diasosiasikan dengan peningkatan inflasi sekitar 0,0037 poin persentase, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Pengaruh positif tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme *cost-push inflation*, yaitu ketika kenaikan upah minimum meningkatkan biaya tenaga kerja yang ditanggung perusahaan. Peningkatan biaya tersebut, terutama pada sektor padat karya, dapat mendorong pelaku usaha menyesuaikan harga barang dan jasa untuk mempertahankan keuntungan. Akibatnya, kenaikan biaya produksi

dapat diteruskan kepada konsumen dan memberikan tekanan terhadap tingkat harga secara umum.

Temuan penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Siringo-Ringo dkk. (2025) yang menemukan bahwa UMP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Sulawesi Utara dalam jangka panjang. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa dampak kebijakan pengupahan terhadap inflasi dapat berbeda antarwilayah. Hubungan antara UMP dan inflasi dapat dipengaruhi oleh struktur pasar tenaga kerja, proporsi tenaga kerja formal dan informal, tingkat produktivitas pekerja, serta komposisi sektor ekonomi yang dominan di masing-masing daerah. Pada wilayah yang didominasi sektor padat karya, kenaikan UMP berpotensi lebih cepat meningkatkan biaya produksi dan diteruskan ke harga barang dan jasa. Sebaliknya, apabila kenaikan upah diikuti oleh peningkatan produktivitas tenaga kerja, dampaknya terhadap biaya produksi dan inflasi dapat lebih terbatas. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa transmisi kebijakan pengupahan terhadap inflasi bersifat heterogen antarwilayah dan tidak selalu menghasilkan dampak yang sama pada setiap provinsi.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel menggunakan *Random Effect Model* (REM) mengenai pengaruh *fintech*, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap inflasi di enam provinsi Pulau Jawa periode 2021–2025, dapat disimpulkan bahwa *fintech* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi dengan koefisien -0,643247 dan probabilitas 0,0000. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan transaksi *fintech* justru diasosiasikan dengan penurunan inflasi, yang diduga terjadi melalui peningkatan efisiensi pasar dan transparansi harga akibat digitalisasi sistem pembayaran, bukan semata-mata melalui peningkatan permintaan agregat sebagaimana dijelaskan dalam teori kuantitas uang.

Konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi dengan koefisien 0,210755 dan probabilitas 0,0015. Hasil ini konsisten dengan teori *demand-pull inflation*, yaitu peningkatan permintaan agregat dari rumah tangga dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi. Penetrasi internet juga menunjukkan pengaruh positif terhadap inflasi dengan koefisien 0,017019 dan probabilitas 0,0499. Meskipun secara statistik signifikan pada tingkat 5%, nilai probabilitas tersebut sangat dekat dengan batas signifikansi sehingga hasilnya perlu dimaknai secara hati-hati dan dikonfirmasi melalui analisis sensitivitas atau penambahan periode pengamatan.

Selanjutnya, UMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi dengan koefisien 0,366394 dan probabilitas 0,0086. Temuan ini konsisten dengan mekanisme *cost-push inflation*, di mana kenaikan UMP meningkatkan biaya tenaga kerja dan biaya produksi dunia usaha yang kemudian berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.

Secara simultan, *fintech*, konsumsi rumah tangga, penetrasi internet, dan UMP berpengaruh signifikan terhadap inflasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa dengan probabilitas *F-statistic* sebesar 0,000000. Nilai *R-squared* sebesar 0,956351 menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut mampu menjelaskan 95,6% variasi inflasi, sedangkan 4,4% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti nilai tukar, harga komoditas global, dan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika inflasi di Pulau Jawa tidak hanya dipengaruhi oleh faktor permintaan konvensional melalui konsumsi rumah tangga dan kebijakan ketenagakerjaan melalui UMP, tetapi juga oleh perkembangan ekonomi digital melalui *fintech* dan penetrasi internet. Kedua faktor digital tersebut menunjukkan arah pengaruh yang berbeda, sehingga digitalisasi ekonomi memiliki mekanisme yang kompleks dalam memengaruhi dinamika inflasi di tingkat regional.

Daftar Pustaka

Aginta, H., & Someya, M. (2022). Regional economic structure and heterogeneous effects of monetary policy: evidence from Indonesian provinces. Journal of Economic Structures, 11(1), 1–25. https://doi.org/10.1186/s40008-021-00260-6

Anam, M. S., Silahul Mu'Min, M., & Kartiko, N. D. (2024). Does Financial Technology Reduce Inflation? Lessons Learnt From Sumatra. Economic Horizons, 26(3), 253–267. https://doi.org/10.5937/ekonhor2403267A

Anggraini, A., & Agustin, G. (2022). Effect Cashless Payment on Inflation with Velocity of Money as Intervening Variable. Jurnal Ekonomi Balance, 18(2), 199–207. https://doi.org/10.26618/jeb.v18i2.9606

Azilla, W., & Novianda, B. (2024). Household Consumption and Electronic Money Transactions in Indonesia: VECM Approach. Economics Development Analysis Journal, 13(1), 55–68. https://doi.org/10.15294/edaj.v13i1.78819

Badan Pusat Statistik. (2026). Distribusi PDRB Terhadap Seluruh Provinsi Indonesia Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi. Badan Pusat Statistik. https://www.bps.go.id/id/query-builder

Chandra, D., & Nasution, L. N. (2026). Digital Economic Transformation and its Implications for Monetary Economic Policy in Indonesia Transformasi Ekonomi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebijakan Ekonomi Moneter di Indonesia. 5(1), 1027–1032.

Dakhi, H. F., Widyasyari, A., Oktavia, D. S., Kristedy, H., Mahdalena, Novi, Wiyanti, S., Prasetyo, W., & Ompusunggu, D. P. (2024). Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Tingkat Inflasi Di Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia, 2(1), 61–68. https://doi.org/10.61132/jepi.v2i1.263

Darwiche, J., & Baker, N. B. (2026). Do Internet-Driven Trade Shocks Moderate the Exchange Rate Pass-Through to Inflation? International Journal of Finance and Economics, 1–14. https://doi.org/10.1002/ijfe.70146

Fitrianti, M., & Rachmawati, L. (2024). Analysis of the Influence of Money Supply, Interest Rates, and Exchange Rates on Inflation in Indonesia. International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR), 8(2), 1–10. https://doi.org/10.29040/ijebar.v8i2.13443

Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics (4th ed.). McGraw Hill.

Hermawan, D., Lie, D., Sasongko, A., & Yusan, R. I. (2024). Money velocity, digital currency and inflation dynamics in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 60(3), 305–345. https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2398347

Mubaroh, A. Y., & Yulianto, S. (2025). Pendekatan Data Panel Dalam Menganalisis Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa. Jurnal Riset Statistika, 65–74. https://doi.org/10.29313/jrs.v5i1.7126

Rachmadona, R., & Astuti, R. D. (2025). Money supply, interest rates, and electronic money as determinants of inflation in indonesia: Evidence from vecm analysis (2018–2023). Journal Magister Ilmu Ekonomi Universtas Palangka Raya : GROWTH, 11(2), 84–93. https://doi.org/10.52300/grow.v11i2.24760

Siagian, Y., & Hayati, B. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Output Gapdan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi Di 33 Provinsi Di Indonesia Pada Tahun 2014-2018. Diponegoro Journal of Economics, 9, 110–118.

Siringo-ringo, O., Rotinsulu, T. O., & Tumangkeng, S. Y. L. (2025). Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Belanja Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Inflasi di Sulawesi Utara Tahun 2000-2023. Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi, 25(2023), 65–76.

Sugiyono. (2017). Metode Analisis Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D. In Sustainability (Switzerland) (Vol. 11, Number 1). Alfabeta. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

Susanti, R. T. (2023). Analisis Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Harga Beras Provinsi Di Pulau Jawa. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 6(1), 45–62. https://doi.org/10.14710/jdep.6.1.45-62

Syahputri, A. Z., Fallenia, F. Della, & Syafitri, R. (2023). Kerangka berfikir penelitian kuantitatif. Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran, 2(1), 160–166.

Wahyudi, S. T., Khusaini, M., & Nabella, R. S. (2021). Mengukur Persistensi Inflasi: Studi Komparasi Delapan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 12(2), 117–129. https://doi.org/10.22212/jekp.v12i1.1905